

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan ekonomi daerah khususnya daerah kota/kabupaten merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, harus mempunyai sumber keuangan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Oleh

karena itu, peranan PAD yang merupakan bagian dari pendapatan daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di dalam Pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Pembangunan daerah diharapkan agar tidak hanya bersifat di daerah perkotaan tetapi harus mencakup keseluruhan suatu daerah dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Selama ini pembangunan yang berjalan hanya terjadi di pusat saja sedangkan pembangunan di daerah hampir tidak ada. Hal ini disebabkan dana yang sebenarnya untuk pembangunan daerah untuk hampir seluruhnya disetor ke pusat

sehingga terjadi ketidakseimbangan pembangunan. Dengan demikian tergantung pada pusat dalam pembiayaan pembangunan.

Suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung dalam melaksanakan tugas dan pembangunan, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing - masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal.

Demikian juga halnya dengan Kabupaten Solok yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Solok berusaha untuk meningkatkan PAD melalui sumber- sumber PAD nya yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat. Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Solok seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambah sumber penerimaan yang diterima oleh daerah.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok Menurut Komponen Penerimaan
Tahun 2014 – 2018 (rupiah)

Komponen PAD	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Pajak Daerah	10.313.711.700	10.293.381.434	11.441.155.030	11.644.195.600	17.518.108.100
2. Retribusi Daerah	15.294.823.230	12.177.054.275	13.198.160.410	8.044.071.100	9.343.046.440
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah	5.977.772.170	5.619.223.492	6.509.481.950	6.517.459.440	7.539.330.060
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah	19.915.841.450	19.890.589.500	27.654.679.843	34.572.183.210	37.310.483.210
Jumlah	51.502.148.550	47.980.248.701	58.803.477.230	60.777.909.350	71.710.967.810

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Solok selama tahun 2014 – 2018 mengalami beberapa kali peningkatan. Pajak daerah dan lain – lain pendapatan daerah yang sah setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2014 -2018, tetapi tidak dengan retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya..

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan daerah tidak memberikan balas jasa secara langsung yang dapat dirasakan, sedangkan retribusi daerah balas jasanya dapat dirasakan secara langsung. Menurut sifat pelaksanaannya, pajak daerah berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan retribusi daerah hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu untuk orang yang menikmati jasa (Kurniawan,Panca, 2004).

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari setiap daerah juga menjadi salah satu penerimaan PAD . Walaupun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan masih terhitung kecil pengaruhnya terhadap PAD dan tidak sebanyak penerimaan dari pajak, namun hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat memperlihatkan bagaimana suatu daerah mengukur kemampuan

daerahnya dalam membangun potensi PAD di luar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan daerah yang sah juga menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bahkan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Solok
Tahun 2014 – 2018 (jiwa)

Jenis kelamin	2014	2015	2016	2017	2018
Laki-laki	178.280	179.721	180.992	182.275	183.577
Perempuan	182.815	183.963	185.221	186.417	187.528
Jumlah	361.095	363.864	366.213	368.692	371.105

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dari tabel 1.2 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Solok dari tahun ketahun sangat melaju pesat. Karena pada tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Solok mencapai 361.095 juta jiwa dan pada akhir tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Solok mencapai 371.105 juta jiwa.

Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit, maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber – sumbernya dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin. Sebaliknya, apabila suatu daerah menderita over population, maka penduduk dapat memanfaatkan tanah maupun modalnya seefisien mungkin, namun demikian, karena penduduk terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap orangpun menjadi sangat kecil. (Rosidi,2002:92).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mencoba meneliti mengenai **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Solok”**

1.2 Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis berusaha merumuskan permasalahan. Adapun permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Solok ?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Solok?
3. Apakah pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Solok?
4. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Solok?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Solok

2. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Solok
3. Untuk menganalisis pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD di Kabupaten Solok
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Kabupaten Solok

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi berbagai kalangan pada umumnya. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terutama ekonomi publik serta dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan bagi peneliti berikutnya di bidang yang sejenis
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah terkhusus Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam pembuatan kebijakan pemerintah dalam peningkatan PAD pada masa yang akan datang.